



Dari Moralitas ke Teknokrasi: Pergeseran Narasi Teknopolitik Presiden Prabowo Subianto dalam Pemberitaan Google News

From Morality to Technocracy: The Shift in the Technopolitical Narrative of President Prabowo Subianto in Google News Reporting

Andika Sanjaya^{1*}, Intan Triadini², Agustia Landra Nugraha³

¹Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

³Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
as552@ums.ac.id*, intantriadini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana komunikasi teknopolitik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama 200 hari pertama dibingkai oleh media melalui platform agregator Google News. Penelitian strategi komunikasi politik kepresidenan di Indonesia saat ini hanya mengarah pada konteks media sosial dan kecerdasan buatan. Penelitian ini mengisi kekosongan riset tentang strategi komunikasi politik bermediasikan platform agregator. Menggunakan analisis framing Robert M. Entman dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menelaah bagaimana media membingkai penggunaan teknologi oleh pemerintah. Model Entman membagi proses pembingkai ke dalam empat tahapan, yaitu: mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan menyarankan penyelesaian. Data diperoleh dari kumpulan berita mengenai pemerintahan Prabowo Subianto yang terindeks di Google News dalam rentang waktu 200 hari pertama pemerintahannya. Jumlah berita yang dianalisis dalam penelitian adalah 144 berita. Peneliti membagi berita menjadi tahapan 0-100 hari pertama dengan enam berita relevan, sedangkan tahapan 100-200 hari kemudian membatasi pada sembilan berita. Hasil penelitian ini membedah pergeseran narasi pemerintahan Prabowo dari fokus moralitas di 100 hari pertama menuju ambisi teknokrasi nuklir dan digital pada periode 100 hari berikutnya. Penelitian ini menggarisbawahi narasi kebangkitan teknologi tingkat tinggi pemerintah dalam rezim teknopolitik dunia. Presiden memiliki imajinasi sosioteknik untuk beragam solusi permasalahan bangsa, meskipun harus berhadapan dengan ancaman ekstraktivisme baru dan pencitraan palsu.

Kata kunci: Teknopolitik; Komunikasi politik; Prabowo Subianto; framing; Google News

Abstract

This research aims to analyse how the technopolitical communication of President Prabowo Subianto's administration during the first 200 days was framed by the media through the Google News aggregator platform. Current research on presidential political communication strategies in Indonesia is only directed towards the context of social media and artificial intelligence. This research fills the gap in studies on political communication strategies mediated by aggregator platforms. Using Robert M. Entman's framing analysis with a qualitative descriptive approach, this research examines how the media frames the government's use of technology. The Entman model divides the framing process into four stages: defining the problem, diagnosing the cause, making a moral judgement, and suggesting a remedy. Data were obtained from a collection of news articles about Prabowo Subianto's administration indexed on Google News within the first 200 days of his administration. The number of news articles analysed in the study was 144

articles. The researchers divided the news into two phases: the first 0-100 days with six relevant articles and the 100-200 days phase with nine articles. The results of this study dissect the shift in Prabowo's administration narrative from a focus on morality in the first 100 days to ambitions of nuclear and digital technocracy in the following 100 days. This research underscores the narrative of the government's rise in high-level technology within the global technopolitical regime. The President has a sociotechnical imagination for various solutions to the nation's problems, even though he must face the threat of new extractivism and false reification.

Keywords: *Technopolitics; Political Communication; Prabowo Subianto; framing; Google News*

I. PENDAHULUAN

Seorang figur politik membutuhkan suatu artefak teknologi untuk tujuan politiknya (Sanjaya, Fauzani, Riyadi, Nugraha, 2024). Artefak teknologi dalam konteks komunikasi politik berupa media atau saluran (*channel*) yang berperan dalam fungsi-fungsi komunikasi. Salah satu bentuk media yang populer, digunakan untuk mendistribusikan pesan-pesan politik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, adalah media sosial (Purworini, 2014; Rizky, Harris, Soekarno, 2023; Noviafni, Sarmiati, Asnawi, 2025). Pergeseran lanskap komunikasi politik ditandai dengan mulai berkurangnya loyalitas para pemilih terhadap suatu ideologi dan partai politik. Era media sosial mengharuskan politisi selalu hadir dan mempersuasi para pemilih yang selalu bergejolak dan terlibat pertentangan (Adnan & Mona, 2024). Pergeseran lanskap komunikasi politik ini memaksa politisi untuk mengadopsi tren media atau artefak teknologi komunikasi politik terkini.

Tokoh politik menggunakan media sosial, meskipun belum meninggalkan alat kampanye tradisional lain seperti baliho dan banner. Penguasaan media sosial berdampak pada potensi perolehan 107 juta pemilih dari kalangan pemuda, mencapai lebih dari lima puluh persen (Rizky, Harris, Soekarno, 2023). Media sosial memberi ruang bagi pemilih untuk menjalankan jurnalisme warga (*citizen journalism*), menyuarakan aspirasi dan kepentingan politik mereka. Penggunaan media sosial juga menghasilkan konstelasi politik antar penggunanya, memunculkan istilah pendengung (*buzzer*) yang cenderung memiliki kedekatan dengan calon tertentu (Alif, 2023). Berita palsu atau *hoax* (hoaks) menjadi fenomena tak terhindarkan dalam konstelasi politik di era media sosial yang melibatkan buzzer (Juditha, 2024). Transformasi lanskap komunikasi politik inilah yang membuat tokoh politik perlu adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi.

Salah satu bentuk strategi komunikasi politik adalah dengan *paid publicity* (publisitas berbayar). Tokoh politik membayar media untuk mempublikasikan berita atau konten yang menguntungkan mereka, khususnya yang mempengaruhi citra positif tokoh tersebut. Publisitas berbayar bukan hanya dilakukan dengan membayar pemilik akun media sosial, namun kepada media situs berita online. Media situs berita online, dalam artian media seperti Detik dan Kompas, masih memiliki peranan dalam lanskap komunikasi politik (Hafid,

Jannah, Jauhari, 2024). Tokoh politik tidak hanya mengelola jejaring media sosial, namun juga mengoptimalkan publisitas melalui media situs berita online.

Ilmuwan teknologi politik bernama Gabrielle Hecht menjelaskan bahwa seorang figur politik dalam mewujudkan tujuan politik dapat memilih artefak teknologi tertentu (Sanjaya, Fauzani, Riyadi, Nugraha, 2024). Media merupakan artefak teknologi yang dapat menjadi alat bagi figur politik. Konsep terkait, *techno-populis (techno-populist)* merupakan salah satu bagian dari teknopolitik yang menunjukkan kepemimpinan yang merangkul masyarakat menggunakan teknologi media (Arslan, 2025). Teknologi tidak dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan politik tanpa aspek sosiopolitik (Dotson, 2015) dan kerja sama lintas pemangku kepentingan (Karvonen, 2020). Oleh karena itu, media situs berita online merupakan salah satu artefak teknologi sekaligus pemangku kepentingan yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi politik. Komunikasi teknopolitik dapat diartikan sebagai proses komunikasi politik menggunakan teknologi, dalam konteks ini media situs berita online.

Popularitas menjadi salah satu tujuan figur politik, oleh karena itu, pemilihan media sebagai saluran sangat berkaitan dengan jangkauan terhadap calon pemilih. Salah satu pertanda popularitas dalam konteks media online di Indonesia adalah ketika suatu figur politik muncul dalam agregasi berita media-media besar di Indonesia. Google News adalah salah satu situs penyedia agregasi berita yang mengumpulkan berita-berita dari media populer di Indonesia. Platform agregator dapat menghubungkan minat pembaca kepada berita-berita perusahaan media. Pembaca dapat mengakses berita-berita yang terintegrasi dalam satu platform berdasar pencarian mereka di Google (Zulfikar, Wibisono, Wahyudin, 2025).

Salah satu contoh kasus implementasi komunikasi politik menggunakan teknologi atau komunikasi teknopolitik yaitu Presiden RI yang dilantik tahun 2024, Prabowo Subianto. Antara 2009 hingga 2024, Prabowo telah empat kali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden, satu kali menjadi calon wakil presiden dan tiga kali menjadi calon presiden (Husain, 2025). Prabowo berhasil memenangkan upaya keempat setelah melalui pergeseran strategi kampanye.

Pemanfaatan media sosial yang menyasar kedekatan emosional dengan generasi Z (Gen Z) menjadi titik balik keberhasilannya setelah terpilih pada percobaan keempat. Prabowo memanfaatkan podcast dan melakukan sosialisasi ke para pengguna media sosial untuk memperkuat *personal branding* (citra diri) selama masa kampanye. Gaya dan tingkah lucu Prabowo membuatnya viral dan memperoleh atensi publik (Rizky, Harris, Soekarno, 2023).

Prabowo memiliki tingkat keterlibatan (*engagement rate*) hingga 8,17 persen, lebih tinggi dari kedua calon presiden lain pada periode kampanye tersebut (Adnan & Mona, 2024). Figur politik harus menyesuaikan strategi komunikasi politik dengan target demografi calon pemilih. Perubahan gaya komunikasi politik ramah dan inklusif di panggung depan, serta struktur kampanye yang fleksibel dan adaptif di panggung belakang, keduanya memberi

dampak pada penguatan tingkat keterlibatan Prabowo pada media sosial (Husain, 2025).

Pemilihan calon wakil presiden pada Pilpres tahun 2024, Gibran Rakabuming Raka, yang berasal dari kalangan muda memperkuat strategi komunikasi politik berbasis media sosial. Salah satu artefak teknologi yang digunakan oleh pasangan Prabowo-Gibran adalah teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). Pemanfaatan teknologi AI digunakan Prabowo-Gibran untuk membuat konten poster dan desain animasi yang menarik pengguna media sosial. Adaptasi teknologi komunikasi menjadi salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Prabowo dan Gibran, menjadikan figur politik tersebut sesuai dengan konsep teknopolitik (Susetyawidianta & Gerald, 2024).

Prabowo juga menjalankan strategi komunikasi teknopolitik bekerja sama dengan media situs online untuk menjalankan publikasi berbayar. Salah satunya merujuk pada upayanya dalam mengundang awak media dalam deklarasi kampanye presidennya, sekaligus mengangkat janji kampanye berupa dana abadi pesantren (Hafid, Jannah, Jauhari, 2024). Upaya tersebut menunjukkan strategi komunikasi teknopolitik melibatkan pemangku kepentingan perusahaan media online yang dilakukan oleh Prabowo.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkap pemberitaan situs agregator Google News selama 200 hari pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran. Penelitian ini memfokuskan pada tema teknologi yang muncul dalam halaman berita Google News. Ada beragam artefak teknologi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan, tidak terbatas pada media sosial. Tanda 100 hari menunjukkan arah kebijakan presiden yang baru saja terpilih, mengindikasikan keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan di Indonesia (Mustainah & Indrariyani, 2025), maupun negara lain seperti Amerika Serikat (Strauss & Metzger, 2021).

Transisi kekuasaan selama 100 dan 200 hari mengharuskan adaptasi lapisan politik yang tebal antara pemerintahan lama dan baru, sekaligus memperkenalkan kebijakan-kebijakan baru (Strauss & Metzger, 2021). Pemerintahan Prabowo-Gibran yang sejak kampanye sudah menggunakan kebijakan teknologi seperti AI, seharusnya diikuti strategi komunikasi teknopolitik pada 100 hari pertamanya. Pemilihan tenggat waktu 200 hari menunjukkan waktu penelitian yang lebih panjang dan diharapkan dapat memberikan gambaran lebih baik tentang kebijakan teknologi Prabowo setelah terpilih. Secara khusus, penelitian ini memfokuskan pada pemimpin pemerintahan utama, Prabowo.

Penelitian sebelumnya menyoroti penggunaan strategi komunikasi politik figur politik dalam pilpres menggunakan media sosial (Alif, 2023; Adnan & Mona, 2024; Husain, 2025; Noviafni, Sarmiati, Asnawi, 2025), AI (Susetyawidianta & Gerald, 2024; Juditha, 2024). Penelitian Hafid, Jannah, Jauhari (2024) menggarisbawahi penggunaan media situs berita online sebagai saluran komunikasi politik melalui tiga pola pencitraan. Pola pencitraan tersebut yaitu publisitas berbayar, publisitas murni (*pure publicity*), dan publisitas penunggang

gratis (*free ride publicity*). Publisitas murni merupakan kegiatan promosi melalui aktivitas sosial masyarakat, sedangkan publisitas penunggang gratis memanfaatkan akses atau menggunakan pihak lain untuk mengangkat diri sendiri. Ketiga pola publisitas tersebut menunjukkan bahwa media online masih memiliki tempatnya dalam strategi komunikasi politik di Indonesia. Kesenjangan penelitian (*research gap*) berdasar penelitian-penelitian tersebut adalah minimnya penelitian strategi komunikasi politik dengan artefak teknologi situs agregator media online. Situs agregator media online merupakan salah satu saluran politik yang terabaikan di era populernya media sosial. Media online dapat mempengaruhi masyarakat melalui pembingkai (*framing*) tertentu (Azahra, Permadi, Edy, 2025)

Penelitian sebelumnya tentang kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga tidak mengarah pada situs agregator Google News. Padahal, salah satu bentuk popularitas figur politik melalui media situs online adalah ketika mereka dapat masuk ke platform Google, platform integral yang dapat diakses oleh pengguna dari seluruh Indonesia. Penelitian sebelumnya tentang 100 hari pemerintahan Prabowo juga berkonteks pada dunia pendidikan (Mustainah & Indrariansi, 2025). Dari sudut pandang metode penelitian, penggunaan analisis framing teknopolitik juga sangat terbatas. Penelitian Putri dan Sanjaya (2024) menggunakan analisis framing, tapi tidak dalam konteks teknopolitik dan kepresidenan, melainkan berfokus pada buzzer politik. Kesenjangan penelitian juga melebar pada minimnya studi framing teknopolitik berbasis agregator berita dalam periode 200 hari pemerintahan. Periode 200 hari pemerintahan merupakan waktu krusial bagi politisi untuk membangun pemerintahan dengan bantuan artefak teknologi mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana agregator media online memberitakan pemanfaatan artefak teknologi Prabowo Subianto dalam 200 hari pemerintahannya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana agregator media online memberitakan teknopolitik di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis framing Robert M. Entman dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti memandang bahwa setiap teks dari media online selalu mengandung bingkai (*frame*) tertentu. Bingkai ini membentuk cara pandang publik tentang suatu realitas politik. Metode analisis framing Entman terbagi menjadi empat tahapan, diawali dengan mendefinisikan masalah (*defining problems*) atau penentuan isu atau peristiwa utama yang dianggap penting oleh media. Tahapan kedua adalah mendiagnosis penyebab (*diagnosing causes*) atau mengidentifikasi aktor atau faktor penyebab terkait suatu isu atau peristiwa. Tahapan ketiga adalah membuat penilaian moral (*making moral judgements*) atau menilai isu atau peristiwa berdasar standar moral tertentu. Tahapan terakhir adalah menyarankan penyelesaian masalah (*suggesting*

remedies) atau menawarkan solusi atau tindakan tentang suatu isu atau peristiwa (Hafid, Jannah, Jauhari, 2024; Putri & Sanjaya, 2024).

Peneliti menggunakan sampling purposif atau *purposive sampling* dengan mencari data dari Google News dengan kata kunci “Teknologi Presiden Prabowo Subianto”. Pemilihan kata kunci ini disebabkan preferensi media dalam memilih kata “teknologi” dalam pemberitaan. Kata kunci “teknopolitik” menghasilkan pencarian kosong dalam Google News. Kata kunci “politik” juga tidak banyak muncul karena kata penggunaan teknologi terkesan tidak berkaitan langsung dengan politik dalam pemberitaan. Penggunaan kata “Presiden” dan “Prabowo Subianto” yang bersamaan berasal dari penekanan peran kepresidenan dalam pemberitaan, bukan sekedar aspek personal.

Peneliti membatasi pencarian berita antara tanggal 20 Oktober 2024 dan 8 Mei 2025, yaitu hari pertama sumpah jabatan Prabowo Subianto sebagai kepala negara hingga 200 hari pemerintahannya. Peneliti mempelajari seluruh berita yang terangkum dalam aggregator dalam rentang waktu tersebut untuk menemukan pola pembingkai yang muncul tentang pemanfaatan teknologi Presiden Prabowo. Kriteria inklusi dan eksklusi berita adalah validitas isi (*content validity*) dengan arah konten berita yang dipilih mengandung unsur “penggunaan teknologi”. Suatu berita dipilih jika mengandung unsur-unsur pemanfaatan salah satu artefak teknologi, semisal nuklir, drone, atau media sosial. Berita tersebut juga mengandung unsur “strategi presiden” dan unsur “dampak kepada masyarakat”. Kriteria tersebut bermanfaat untuk menyaring berita-berita yang tidak relevan meski mengandung kata teknologi, semisal berita pelantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kata “teknologi” dalam berita tersebut tidak berkaitan dengan strategi teknopolitik presiden. Penggunaan kata “Presiden” dan “Prabowo Subianto” sebagai kriteria inklusi pemilihan berita yang relevan dengan strategi figur politik tersebut. Peneliti memastikan arah pemberitaan berpusat pada Presiden Prabowo Subianto, bukan figur politik lainnya seperti dalam berita berjudul “Wiranto, sang jenderal dengan karier politik segudang”. Berita tersebut mengandung kata Prabowo Subianto, tapi fokus pemberitaannya tidak relevan. Proses reduksi data tersebut menghasilkan 15 berita yang relevan.

Peneliti membagi berita-berita terpilih tersebut menjadi dua periode pemberitaan, yaitu 100 hari dan 200 (101-200) hari pemerintahan. Periode pertama mencakup enam berita, sedangkan periode kedua sembilan berita. Peneliti kemudian membuat tabel analisis untuk menganalisis berita yang terpilih untuk dua periode tersebut dengan menggunakan model Robert Entman. Interpretasi data menggunakan penyusunan tabel terpisah setiap periode pemerintahan (100 hari dan 200 hari). Peneliti kemudian membandingkan hasil analisis dua periode tersebut sebagai pembahasan penelitian dengan elaborasi jurnal-jurnal relevan dengan teori teknopolitik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Periode 100 Hari Pertama Pemerintahan

Proses penelitian kemudian membagi berita menjadi dua periode, yaitu pada periode 100 hari pertama dan 200 hari pertama. Berita-berita tersebut dianalisis menggunakan metode analisis framing Entman menjadi empat tahapan, diawali dengan mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, penilaian moral, dan penyelesaian masalah. Berikut daftar berita teknopolitik untuk periode 100 hari pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto:

Tabel 1. Sumber Berita Periode 100 Hari Pertama

No	Judul Berita	Sumber Media	Tanggal
1	Presiden Prabowo Subianto Tekankan Pentingnya Swasembada Pangan dan Energi	Sekretaris Kabinet Republik Indonesia	20 Oktober 2024
2	Tegas, Prabowo akan Maksimalkan Teknologi untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan	Sindonews	24 Oktober 2024
3	Meramu teknologi hijau untuk kedaulatan energi	Antaraneews	30 Oktober 2024
4	Prabowo Kaget Buka Sosmed, Jadi Korban Fake News	CNBC	13 Desember 2024
5	Membaca visi kebijakan digital Presiden Prabowo	GovInsider	13 Januari 2025
6	Prabowo Bertekad Intervensi SD Sampai SMA Menggunakan Teknologi	Kumparan	22 Januari 2025

Berita-berita teknopolitik pada periode 100 hari pertama mayoritas berasal dari media swasta / non-pemerintah. Sekretaris Kabinet (Setkab) Republik Indonesia menjadi satu-satunya media internal pemerintah yang mengangkat kebijakan teknologi pemerintahan. Setkab menyuarakan kebijakan teknologi presiden yang mengutamakan swasembada pangan dan energi di awal pelantikan presiden dan wakil presiden. Hal ini menunjukkan peran media pemerintah dalam turut menyuarakan kebijakan pemerintahan di periode 100 hari pertama. Meskipun demikian, berita-berita lainnya berasal dari media swasta. Selain swasembada pangan dan energi, pemerintahan juga mengarahkan kebijakan pada peningkatan mutu pendidikan nasional dan pertahanan siber. Temuan ini menunjukkan peran media online pemerintah pada periode pertama sangat terbatas. Kementerian dan lembaga-lembaga publik lainnya perlu membuat berita-berita yang terindeks GoogleNews untuk mendukung komunikasi politik pemerintahan. Keterbatasan kerja sama lintas pemangku kepentingan menjadi kendala teknopolitik untuk mewujudkan tujuan politik pemerintahan (Sanjaya, Fauzani, Riyadi, Nugraha, 2024; Karvonen, 2020).

Definisi masalah pemberitaan periode 100 hari pertama pemerintahan adalah kedaulatan negara. Visi kedaulatan negara terhambat permasalahan eksternal, semisal ketidakpastian situasi global, dan internal, semisal krisis pangan dan ketergantungan impor. Visi kedaulatan negara menjadi retorika yang

tidak sinkron dengan situasi di lapangan. Munculnya permasalahan distribusi bantuan sosial (bansos) dan korupsi sistemis menunjukkan bukti kegagalan sistem teknologi birokrasi. Kemunculan pemberitaan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program utama pemerintah bersamaan dengan permasalahan pendidikan yang belum terselesaikan. Program prioritas perbaikan gizi siswa sekolah dihadapkan dengan situasi kekurangan akses dan mutu pendidikan nasional. Kejadian presiden menjadi korban berita bohong (*fake news*) menunjukkan bahwa pemerintah belum siap dan masih bersikap reaktif dalam menghadapi potensi penyebaran hoax dan serangan siber.

Diagnosa penyebab tingginya angka impor disebabkan keterbatasan hilirisasi atau pengolahan nilai tambah komoditas lokal. Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah seperti sawit, singkong, geotermal, dan air, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Indonesia juga dianggap lambat dalam perpindahan sistem energi konvensional atau energi fosil menuju teknologi rendah karbon. Penyebab pengelolaan bantuan yang kurang tepat sasaran disebabkan aspek integritas pengelola, khususnya keteladanan pimpinan dalam penegakan hukum. Penyebab akses dan mutu pendidikan yang belum merata ke seluruh daerah disebabkan kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi. Pendidikan bertujuan untuk memperbaiki aspek sumber daya manusia, namun keterbatasan jumlah pengajar yang ditempatkan di daerah tertinggal memperburuk kondisi tersebut.

Penyebab ketahanan siber dan teknologi adalah keberadaan elemen masyarakat tertentu yang justru menyalahgunakan teknologi untuk menciptakan konten palsu (*deepfakes* dan *hoax*). Penyalahgunaan teknologi tersebut memiliki tujuan tertentu, terutama berkaitan dengan keuntungan material. Kelemahan penguasaan teknologi pertahanan siber juga menjadi masalah yang harus dihadapi Indonesia untuk mengatasi gangguan digital. Masyarakat Indonesia memerlukan literasi digital dan penguasaan teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan. Analisis masalah dan penyebab tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memanfaatkan teknologi sebagai solusi pemerintahan (Chung, 2026). Pemberitaan ini juga menjadi kritik bagi pemerintahan sebelumnya yang dianggap gagal menyelesaikan ragam permasalahan bangsa.

Keputusan moral pertama merujuk pada nasionalisme sebagai kompas moral. Isu pangan dan energi sangat berkaitan dengan kedaulatan bangsa. Ketergantungan negara terhadap pihak asing, dalam wujud impor pangan dan energi, merupakan dibingkai mencoreng kehormatan bangsa. Pemerintah menghimpun dukungan emosional rakyat untuk menjaga karunia Tuhan sekaligus mewariskan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Keputusan moral kedua adalah perwujudan keadilan sosial melalui intervensi negara. Pemerintah mendefinisikan ulang makna demokrasi melalui ketercapaian akses pendidikan, sebagai salah satu jasa yang disediakan oleh negara untuk rakyat. Pemerintah wajib hadir dan melakukan intervensi agar rakyat kecil mendapatkan

haknya. Oleh karena itu, pengeluaran anggaran di sektor pendidikan tidak boleh diperdebatkan efisiensinya.

Keputusan moral ketiga adalah etika digital dan kesantunan budaya. Berawal dari penyalahgunaan teknologi terhadap figur presiden, Prabowo mengaitkan permasalahan tersebut dengan isu karakter dan kepribadian bangsa. Kehormatan bangsa didukung nilai leluhur "*mikul duwur mendem jero*" atau dapat diartikan menjunjung tinggi kebaikan atau kehormatan dan memendam dalam-dalam kekurangan atau aib. Menjaga lisan di ruang digital merupakan sikap menjaga kehormatan bangsa, di sisi lain, kritik kasar dan merusak dianggap bertentangan dengan moral bangsa. Keputusan moral ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar menjaga sikap, sekaligus menopang stabilitas negara. Keputusan moral keempat adalah kewajiban strategis atas masa depan. Teknologi harus didukung gizi anak agar menjadi investasi moral untuk memperkuat masa depan bangsa. Ketertinggalan masyarakat, khususnya anak-anak, terhadap dua isu tersebut, menjadi dosa suatu bangsa. Teknologi dapat memastikan keadilan pengelolaan pemerintahan. Program penyediaan gizi atau MBG merupakan tanggung jawab moral pemimpin untuk masa depan bangsa.

Rekomendasi penyelesaian masalah dijelaskan dengan kedaulatan nasional dan ekonomi, revolusi teknologi dan birokrasi, serta ketahanan hijau. Kedaulatan nasional dan ekonomi dibingkai dengan pemutusan ketergantungan impor di bidang pangan dan energi. Seluruh pengelolaan bahan mentah dilakukan di dalam negeri agar keuntungan tetap dinikmati negara dan masyarakat. Perbaikan sistem berbasis digitalisasi dan keteladanan kepemimpinan atas ke bawah (*top-down leadership*) menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan korupsi yang sistemik.

Rekomendasi penyelesaian masalah kedua adalah revolusi teknologi dan birokrasi. Teknologi dapat menjadi solusi permasalahan birokrasi yang berbelit, mewujudkan integrasi sistem satu pintu. Integrasi data digital dapat meminimalisir kebocoran anggaran dan meningkatkan akurasi data bantuan. Rekomendasi ketiga adalah ketahanan hijau atau fokus pemerintah pada transisi energi terbarukan atau energi hijau. Indonesia memiliki potensi energi biodiesel B35 dan *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) dan geotermal yang dapat menjadikan Indonesia pemain utama energi hijau dunia. Indonesia juga dapat mengimplementasikan teknologi *Carbon Capture* (CCS atau *Carbon Capture and Storage*) dan CCUS atau *Carbon Capture, Utilization, and Storage*) untuk menyeimbangkan kebutuhan industri dengan target emisi nol bersih. Desa energi berdikari juga menjadi solusi pemerintah sebagai solusi energi berbasis komunitas atau desentralisasi energi.

Framing berita-berita teknopolitik pada periode 100 hari pertama mengarahkan publik untuk melihat bahwa permasalahan bangsa saat ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan persoalan kedaulatan dan martabat. Dengan memposisikan teknologi (digitalisasi) dan pemenuhan gizi (MBG) sebagai investasi moral, pemerintah membangun urgensi bahwa perubahan sistem harus dilakukan secara radikal dan terintegrasi untuk memutus ketergantungan pada

pihak asing. Hasil penelitian pada periode pertama tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membuat imajinasi sosioteknik. Teknopolitik membutuhkan integritas dan kompetensi manusia. Teknopolitik tanpa unsur sosiopolitik hanya akan menjadikan teknopolitik sebagai pencitraan palsu (Chung, 2026). Analisis framing tersebut dapat dirumuskan seperti sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Framing Berita Periode 100 Hari Pertama

No	Elemen Framing	Skripsi Analisis	Spesifik
1	Definisi masalah	Masalah dibingkai sebagai ancaman terhadap eksistensi negara dan hak dasar rakyat yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal.	ketahanan dan kedaulatan, krisis pangan, energi, dan ketergantungan impor. integritas sistem, korupsi sistemis dan kebocoran subsidi/bansos. kualitas SDM, rendahnya mutu pendidikan, gizi anak (isu MBG), dan lambatnya adaptasi teknologi. keamanan digital, serangan siber dan hoaks, termasuk berita palsu terhadap presiden.
2	Diagnosa penyebab	Masalah terjadi karena kegagalan manajemen sumber daya, lemahnya teladan, dan kesenjangan kompetensi.	ketergantungan eksternal, minimnya hilirisasi dan lambatnya transisi ke energi terbarukan. lemahnya integritas, kurangnya keteladanan pimpinan dalam penegakan hukum. kesenjangan akses, distribusi pengajar yang tidak merata di daerah tertinggal. perapuhan digital, penyalahgunaan teknologi untuk keuntungan materiil dan rendahnya literasi digital masyarakat.
3	Keputusan moral	Masalah terjadi karena kegagalan manajemen sumber daya, lemahnya teladan, dan kesenjangan kompetensi.	nasionalisme, impor dianggap mencoreng kehormatan bangsa; SDA adalah karunia tuhan yang wajib dijaga. keadilan sosial, pendidikan dan gizi (MBG) adalah hak rakyat yang wajib diintervensi negara tanpa debat efisiensi anggaran. nilai dan budaya, mengedepankan filosofi " <i>mikul dhuwur mendem jero</i> " di ruang digital, menjaga kehormatan pemimpin adalah menjaga stabilitas. kewajiban strategis, membiarkan anak-anak tertinggal teknologi dan gizi dianggap sebagai "dosa bangsa".
4	Rekomendasi penyelesaian	Masalah dinilai berdasarkan norma kebangsaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.	kedaulatan ekonomi, keputusan impor lewat hilirisasi total dan <i>top-down leadership</i> untuk pemberantasan korupsi. evolusi birokrasi, implementasi teknologi pemerintah satu pintu dan integrasi data digital untuk akurasi bantuan/subsidi. ketahanan hijau, pengembangan B35, SAF, geotermal, dan teknologi <i>carbon capture</i> (CCS/CCUS). desentralisasi, pemberdayaan "desa energi berdikari" untuk kemandirian komunitas.

Periode 200 Hari Pemerintahan

Berikut daftar berita teknopolitik untuk periode 200 hari pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto:

Tabel 3. Sumber Berita Periode 200 Hari Pertama

No	Judul Berita	Sumber Media	Tanggal
1	Diresmikan Prabowo, Ini Teknologi yang Dipakai PLTGU Jawa 1	Detik	30 Januari 2025
2	Prabowo Singgung Manfaat Nuklir untuk RI, Bagaimana Keamanannya?	CNN	26 Februari 2025
3	Presiden Prabowo Targetkan Integrasi GovTech dan Penguatan MBG untuk Tekan Kemiskinan	Presiden RI	15 Maret 2025
4	Batasi Penggunaan Medsos, Prabowo: Teknologi Digital Bisa Rusak Akhlak dan Watak Anak-anak	Kompas	28 Maret 2025
5	Presiden Prabowo Ajak Masyarakat Manfaatkan Teknologi untuk Melaporkan Praktik Korupsi	Tribrata News	7 April 2025
6	Prabowo Subianto Sebut Revolusi AI Sudah Terjadi, Indonesia Harus Siap Kuasai Iptek dan Hadapi Efisiensi Teknologi	Ayobandung	9 April 2025
7	Presiden Prabowo ingin Indonesia belajar teknologi pertanian Yordania	Antara	15 April 2025
8	Presiden Prabowo Tinjau Percepatan Tanam Padi Nasional dengan Teknologi Drone di Ogan Ilir	Kantor Staf Presiden	23 April 2025
9	Digitalisasi Pendidikan Dipercepat, Kemkomdigi Diminta Tancap Gas Jalankan Arah Presiden Prabowo	Metro TV	2 Mei 2025

Berita-berita teknopolitik pada periode 200 hari pertama mayoritas berasal dari media swasta / non-pemerintah. Situs Presiden RI dan Kantor Staf Presiden RI membagikan berita tentang integrasi teknologi pemerintah dan teknologi pertanian untuk swasembada pangan. Tribrata News adalah media resmi Kepolisian RI atau Polri yang turut mengangkat isu teknologi anti korupsi. Periode kedua menunjukkan peningkatan pemberitaan teknopolitik melalui saluran media pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Peningkatan jumlah pemberitaan ini menunjukkan peningkatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan (Karvonen, 2020). Pada tahapan ini, pemerintahan mampu meningkatkan pengaruh media online untuk mendistribusikan pesan-pesan agenda teknopolitik.

Definisi permasalahan berita teknopolitik pada periode ini terbagi menjadi empat isu. Isu pertama adalah krisis energi dan lingkungan. Krisis energi berpotensi meningkatkan risiko pemadaman, terutama di kawasan padat beban di Pulau Jawa dan Bali. Krisis lingkungan dijelaskan sebagai tingginya jejak karbon dari pembangkit listrik konvensional yang mempersulit terwujudnya energi bersih. Adopsi teknologi energi alternatif seperti nuklir berhadapan dengan fobia yang dialami masyarakat. Masyarakat memiliki ketakutan berlebih terkait pembangunan pembangkit tenaga nuklir yang dapat menjadi solusi krisis energi. Isu kedua adalah kedaulatan pangan dan teknologi pertanian. Ketergantungan impor akan mencederai kedaulatan pangan nasional. Teknologi pertanian

memegang peranan penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Akses pupuk murah bagi petani menjadi salah satu kebijakan yang berdampak positif terhadap terwujudnya kedaulatan pangan. Permasalahan lahan atau tanah non-produktif, semisal lahan rawa, yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia, juga perlu dikelola agar memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Permasalahan ketiga adalah kegagalan tata kelola dan integritas pemerintah. Sistem birokrasi yang tidak efisien dan ego sektoral antar elemen pemerintahan menjadi dua aspek yang sangat berkaitan dalam terwujudnya tata kelola yang baik. Korupsi sistemik mengacu pada kebocoran anggaran di dalam internal pemerintahan, dari pusat hingga desa, menghambat distribusi bantuan untuk masyarakat miskin. Pemerintah juga belum menysar secara maksimal untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Isu keempat adalah tantangan SDM, yang terdiri dari aspek manusia dan infrastruktur. Perkembangan teknologi, khususnya otomatisasi dan kecerdasan buatan, berpotensi menyebabkan disrupsi lapangan kerja. Efisiensi perusahaan yang disebabkan teknologi berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Teknologi, khususnya konten digital, juga berdampak negatif pada moral masyarakat. Hal ini juga dipersulit dengan kurangnya distribusi tenaga pengajar atau guru di wilayah terpencil, menghambat pemerataan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga menghadapi isu banyaknya bangunan sekolah yang rusak dan tidak layak pakai, sebagai infrastruktur kunci penguatan SDM.

Diagnosa penyebab pertama adalah inefisiensi infrastruktur energi dan pangan dan ketergantungan metode konvensional. Negara masih bergantung pada sistem pembangkit listrik tua yang mahal, tidak optimal, dan tidak stabil. Tantangan adopsi teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir bukan berasal dari adopsi teknologi tersebut, melainkan pada stigma ketakutan publik yang dikaitkan dengan senjata berbahaya. Keterbatasan rasio mesin pertanian terhadap tenaga manusia menjadikan swasembada pangan mustahil diwujudkan. Diagnosa penyebab kedua adalah fragmentasi sistem pelayanan publik. Sistem yang belum terintegrasi mengakibatkan ketidakakuratan penyaluran bansos. Sistem distribusi bansos berbasis uang kertas, bukan rekening (*cashless*), juga meningkatkan risiko kebocoran. Pengawasan yang bersifat manual, bukan teknologi data waktu nyata (*real-time*), juga memunculkan celah korupsi dikarenakan hambatan geografis.

Diagnosa penyebab ketiga adalah ancaman global dan perubahan ekonomi dunia. Revolusi kecerdasan buatan merupakan ancaman bangsa yang perlu dihadapi dengan kesiapan birokrasi. Birokrasi yang gemuk akan bersaing dengan efisiensi teknologi. Tingginya bahan baku pupuk mengancam ketahanan pangan, menjadikan suatu negara harus membangun kerja sama strategis lintas negara. Indonesia dianggap terlambat menjalin kerja sama dengan Yordania untuk mengakses fosfat, bahan baku pupuk, untuk mendukung ketahanan pangan. Definisi penyebab keempat adalah kesenjangan anggaran pendidikan dan isu geografis. Skala prioritas anggaran pendidikan belum berpihak pada pemerataan kualitas pendidikan. Pemerataan pembangunan fisik bangunan

sekolah di daerah terpencil sulit untuk diwujudkan dengan anggaran yang ada. Teknologi pembelajaran jarak jauh dapat digunakan untuk menjembatani isu geografis.

Keputusan moral pemberitaan periode ini adalah kedaulatan dan tanggung jawab bangsa, keadilan sosial dan integritas anggaran, serta perlindungan masa depan. Keputusan moral pertama memposisikan kemandirian energi dan pangan sebagai kewajiban moral untuk menjaga eksistensi bangsa, bukan sekedar pilihan ekonomi. Slogan “Jika pangan aman, negara aman”, menggeser isu pertanian dari sektor ekonomi menjadi sektor keamanan nasional. Pengembangan sains dan energi nuklir dianggap bertujuan untuk kesejahteraan jangka panjang sekaligus penghormatan terhadap visi pendiri bangsa agar unggul secara intelektual di kancah global. Keputusan moral kedua ditekankan pada perlindungan hak ekonomi rakyat miskin melalui efisiensi digital dan pemberantasan korupsi. Korupsi didefinisikan sebagai pengkhianatan bagi bangsa, oleh karena itu, perlawanan terhadap korupsi merupakan tindakan patriotisme sekaligus ketaatan terhadap hukum. Digitalisasi dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas penggunaan uang rakyat, berpotensi menghemat hingga 100 triliun rupiah.

Keputusan moral ketiga adalah perlindungan masa depan terkait penggunaan teknologi dan perlindungan sosial. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tidak boleh mengorbankan martabat manusia. Efisiensi mesin harus diseimbangkan dengan hak kerja manusia, sebagai penopang kehidupan keluarga. Pembiaran paparan dampak negatif konten digital kepada generasi muda dianggap kegagalan fondasi moral bangsa. Pemerintah harus menjaga konten digital sebagai perlindungan sosial.

Penyelesaian masalah dari pemberitaan periode ini terbagi menjadi lima solusi. Solusi pertama adalah optimalisasi energi dan infrastruktur teknologi menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU). Teknologi ini mengintegrasikan *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU) dan teknologi *single-shaft Combined Cycle Gas Turbine* (CCGT) generasi terbaru. Stabilitas pasokan listrik nasional juga diwujudkan menggunakan teknologi *black start capability*. Pemanfaatan teknologi nuklir non-militer melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diharapkan dapat mendukung pengembangan lintas sektor. Publik perlu diedukasi terkait manfaat nuklir dalam hal energi dan sektor-sektor lain, tidak hanya untuk senjata militer.

Solusi kedua adalah transformasi digital dan tata kelola data menggunakan integrasi aplikasi layanan publik dalam satu platform. Pemerintah berupaya melindungi generasi muda dari dampak negatif media digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Pemerintah juga berupaya mempercepat transformasi digital dan pendidikan inklusif melalui penggunaan smart TV dan platform daring untuk pendidikan nasional.

Solusi ketiga adalah ekonomi inklusif dan kesejahteraan sosial. Kewajiban ekonomi inklusif ini mewajibkan penerima bansos untuk memiliki rekening

sebagai sarana ketepatan distribusi. Program MBG yang diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diproyeksikan dapat menciptakan hingga 1,9 juta lapangan kerja baru. Reformasi birokrasi juga diproyeksikan dapat menciptakan pemerintahan yang ramping, digital, dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

Solusi keempat adalah ketahanan pangan dan diplomasi, terbagi menjadi revolusi hijau dan kerja sama internasional. Revolusi hijau menggunakan drone seperti DJI Agras T40 dan konversi lahan rawa menjadi sawah produktif. Kerja sama internasional diwujudkan dengan diplomasi bilateral dengan Yordania untuk memastikan transfer teknologi dan suplai bahan baku pupuk.

Solusi kelima adalah integritas dan pengawasan publik, terbagi menjadi partisipasi antikorupsi dan respons investigasi pemerintah. Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat menggunakan teknologi rekaman atau video untuk turut serta melaporkan bukti korupsi. Pemerintah juga harus menindaklanjuti laporan masyarakat melalui tim investigasi khusus dan pengamatan anggaran.

Narasi berita-berita teknopolitik pada periode ini membingkai permasalahan stabilitas nasional yang disebabkan ketidaksiapan infrastruktur dan resistensi sosial. Kegagalan sistem lama dan keterlambatan adopsi inovasi global menjadi penyebab permasalahan bangsa. Implementasi teknologi harus didukung integritas dalam pengelolaan anggaran dan sikap patriotik dan etis untuk menjaga martabat bangsa. Modernisasi teknologi yang bersifat adaptif dan integratif harus didukung regulasi digital yang ketat untuk menjamin masa depan bangsa. Analisis framing tersebut dapat dirumuskan seperti sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Framing Berita Periode 200 Hari Pertama

No	Elemen Framing	skripsi Analisis	pesifik
1	Definisi masalah	Masalah sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional yang disebabkan oleh ketidaksiapan infrastruktur dan resistensi sosial terhadap teknologi modern.	isis energi, risiko pemadaman listrik, dan tingginya jejak karbon. obia nuklir di kalangan masyarakat. tergantungan impor pangan dan pupuk. Korupsi sistemik dan birokrasi yang tidak efisien. Korupsi lapangan kerja akibat kecerdasan buatan dan degradasi moral digital.
2	Diagnosa penyebab	Masalah sebagai kegagalan sistem lama, hambatan geografis, serta keterlambatan dalam mengadopsi inovasi global.	tergantungan pada pembangkit listrik tua. igma nuklir sebagai senjata militer, bukan sumber energi. inimnya teknologi pertanian. ebocoran penyaluran bansos tunai secara manual. esenjangan pendidikan di daerah terpencil.

No	Elemen Framing	Skripsi Analisis	Spesifik
3	Keputusan moral	Membingkai pemanfaatan teknologi dan integritas anggaran bukan hanya sebagai pilihan ekonomi, melainkan kewajiban patriotik dan etis.	kedaulatan pangan dan energi sebagai elemen keamanan nasional. Korupsi anti-korupsi sebagai wujud patriotisme dan ketaatan hukum. Digitalisasi sebagai solusi pertanggungjawaban uang rakyat. Keseimbangan teknologi dan harkat kerja manusia. Perlindungan moral anak dari dampak konten digital negatif.
4	Rekomendasi penyelesaian	Menawarkan solusi teknokratis yang terintegrasi, mulai dari penggunaan teknologi pertanian hingga regulasi digital yang ketat.	Pemanfaatan PLTGU dan nuklir oleh BRIN, didukung edukasi publik. Integrasi layanan publik satu platform dan PP TUNAS. Sanksi berbasis rekening dan pengawasan BPKP. Evolusi hijau dengan drone DJI Agras dan diplomasi fosfat. Partisipasi publik dalam pelaporan korupsi via video.

Pembahasan

Pemerintah menunjukkan peningkatan komunikasi teknopolitik pada periode 200 hari pertama melalui pemberitaan melalui saluran lembaga publik. Periode 200 hari pertama menggunakan pendekatan teknokrasi digital dan modernisasi. Jika dibandingkan secara lanjut berdasarkan elemen framing, definisi periode pertama cenderung menyasar pada permasalahan eksistensial, kehadiran suatu negara terhadap hak dasar rakyat. Program fundamental MBG dianggap sebagai wujud kehadiran negara terhadap permasalahan gizi anak. Definisi masalah untuk periode kedua cenderung bersifat sistemik dan menjadi ancaman terhadap stabilitas nasional. Ketidaksiapan infrastruktur dan resistensi sosial terhadap teknologi baru menjadi permasalahan yang bersifat sistemik dan kompleks. Program MBG juga muncul dalam pemberitaan periode kedua, menjadikan posisi penting program tersebut. Program MBG bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesehatan dan psikis untuk generasi muda, khususnya masyarakat miskin dan rentan. Proses distribusi dan kualitas makanan yang disajikan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah untuk menyukseskan program ini (Pancani & Ningsih, 2025).

Diagnosa penyebab pada periode pertama adalah kegagalan moral, sedangkan pada periode kedua adalah kegagalan sistemik. Kegagalan moral dijelaskan sebagai kegagalan pemimpin dalam memberikan contoh atau menjadi teladan dalam pengelolaan sumber daya. Kegagalan sistemik terbagi menjadi kegagalan teknis dan inovasi. Sistem lama yang usang diperparah dengan

keterlambatan adopsi inovasi global memperburuk permasalahan teknopolitik pemerintah. Keputusan moral periode pertama adalah filosofi kewajiban bangsa yang akan sangat berdosa jika mengabaikan masa depan generasi muda. Gizi adalah hak rakyat yang berapapun anggarannya harus diupayakan. Keputusan moral periode kedua adalah patriotisme melalui sikap anti korupsi dan digitalisasi sebagai pertanggungjawaban uang rakyat. Harkat dan martabat manusia harus hadir dalam implementasi teknologi.

Rekomendasi penyelesaian periode pertama bersifat atas ke bawah, sedangkan periode selanjutnya bersifat teknokratis. Periode pertama difokuskan pada strategi nasional seperti hilirisasi, pengembangan energi terbarukan, dan pemberdayaan desa. Periode kedua difokuskan pada solusi teknis dan spesifik dengan teknologi modern. Penggunaan drone untuk pertanian, energi nuklir untuk lintas bidang, digitalisasi bansos, dan integrasi platform pemerintahan, merupakan beberapa solusi pemerintahan untuk periode kedua. Pemerintah beranggapan bahwa teknologi adalah solusi instan, termasuk dalam bidang pertanian. Penelitian berkonteks pertanian desa menunjukkan adanya peran fasilitator, mobilisator, dan regulator yang harus dijalankan oleh pemerintah. Alat pertanian sangat bergantung pada pengelolanya (Mitha & Sukmana, 2025).

Periode pertama bersifat lebih ideologis dan emosional, menjadikan presiden berupaya membangun fondasi bangsa melalui program-programnya. Periode kedua bersifat lebih praktis dan efisien, presiden berusaha melompati ketertinggalan bangsa dari bangsa lain dengan mengadopsi teknologi mutakhir dan transparansi digital. Temuan ini relevan dengan pandangan Gabrielle Hecht tentang teknopolitik bagaimana seorang figur politik dalam memilih artefak teknologi tertentu untuk mewujudkan tujuan politiknya (Sanjaya, Fauzani, Riyadi, Nugraha, 2024) Teknologi bukan sekedar instrumen politik, namun juga mengandung ideologi, kedaulatan, dan identitas nasional. Komunikasi politik terdiri dari elemen pengirim, pesan, saluran, penerima, dan efek (Alif, 2023). Pesan dan saluran tersebut merupakan perwujudan dari teknologi yang dipilih oleh figur politik, dengan efek tertentu yang diharapkan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggaungkan pesan-pesan terkait moral pemimpin dan kehadiran negara (*sovereignty*) pada periode 100 hari pertamanya. Haluan tersebut bergeser pada teknologi sebagai solusi kegagalan sistemik di masa lalu. Kegagalan sistemik ini juga berkaitan dengan kegagalan pemerintahan sebelumnya. Dalam narasi 200 hari kedua, pemerintah mengangkat isu teknologi nuklir sebagai salah satu solusi bangsa. Teknologi nuklir merupakan teknologi tingkat tinggi yang menjadi rujukan Hecht (2009) sebagai simbol rezim teknopolitik dunia.

Kepercayaan Prabowo terhadap teknologi, terutama pada periode kedua, mengacu pada konsep imajinasi sosioteknik (*sociotechnical imaginaries*). Konsep ini mengacu pada imajinasi masa depan dengan teknologi yang dapat menjadi solusi beragam permasalahan yang dihadapi bangsa. Kecerdasan buatan dapat digunakan sebagai solusi teknologi untuk mengintegrasikan pengelolaan pemerintahan, namun oleh pemberitaan media belum mengarah ke

pendapat tersebut (Chung, 2026). Sudut pandang teknologi sebagai solusi dan ancaman perlu dikaji lebih lanjut, bagaimana pemerintah beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang bergerak cepat. Permasalahan lain yang dihadapi pemerintah dalam penggunaan teknologi adalah minimnya konsensus antar pemangku kepentingan terhadap suatu konsep. Salah satu contohnya adalah konsep bioekonomi, studi di Eropa menunjukkan adanya kesenjangan antara strategi resmi pemerintah dan visi yang beragam yang muncul di berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Bioekonomi mencakup konsep bioenergi yang digaungkan Prabowo dalam pemberitaannya, yaitu transisi energi dari energi fosil ke energi hijau terbarukan (Hausknost, Schriebl, Lauk, Kalt, 2017).

Kesenjangan teknokratis tetap terjadi meskipun pemerintah sudah menyediakan beragam program untuk menyelesaikan beragam permasalahan di masyarakat, pemerintah selalu menghadapi tantangan pelaksanaan kebijakan. Biaya, partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan kesadaran pemangku kepentingan menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Kebijakan teknokratis harus disertai edukasi masyarakat dan dukungan pemangku kepentingan yang berkelanjutan. Ada kecenderungan suatu program teknologi tidak mencapai kalangan tertentu di masyarakat, terutama masyarakat bawah (Pora, Djen, Muksin, 2025). Meskipun demikian, suatu teknologi tertentu dapat berdampak positif kepada masyarakat, namun juga menghadapi tantangan tertentu semisal literasi digital, infrastruktur teknologi, dan keterbatasan sumber daya pada tingkatan lokal (Syam, Zaeni, Arum, Kurnia, Triwardhani, 2025).

Kecerdasan buatan sebagai salah satu teknologi terbaru justru menjadi ancaman yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Otomatisasi yang didorong kecerdasan buatan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat, memunculkan ketakutan akan kehilangan lapangan kerja di kalangan mereka. Namun, meskipun demikian, teknologi asisten digital yang berbasis kecerdasan buatan justru dapat memicu munculnya *de-skilling* atau penurunan standar kualifikasi. Kecanggihan teknologi mampu memangkas kualifikasi tinggi yang harus dimiliki oleh angkatan kerja tertentu, menjadikan pekerjaan tertentu dapat dijalankan oleh angkatan kerja dengan kualifikasi rendah sekalipun. Di satu sisi, kondisi ini memberikan peluang bagi angkatan kerja yang lebih luas, namun di sisi lain pemberi kerja dapat memegang posisi kuat dalam mengatur angkatan kerja berbiaya murah (Schaupp, 2021). Alih-alih teknologi dapat memberikan masyarakat lapangan kerja, namun kondisi tersebut justru bermuara kepada eksploitasi yang tertutup (Zhang, 2022). Penelitian berkonteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa kecerdasan buatan dapat meningkatkan kualitas komunikasi pemasaran. Namun, teknologi yang kompleks, biaya yang terbatas, serta minimnya dukungan pelatihan dan fasilitas menjadi penghambat adopsi masyarakat terhadap teknologi baru seperti kecerdasan buatan. Di sisi lain, relasi pertemanan dapat menjadi solusi dari penerimaan suatu teknologi di kalangan masyarakat (Setyawan, 2017; Zamzami & Arviani, 2025).

Beragam teknologi yang digunakan oleh pemerintah berkaitan dengan latar belakang sejarah konsep teknopolitik, yaitu dalam konteks nuklir. Ada beragam pandangan terkait teknopolitik nuklir, termasuk ekstraktivisme dan keberlanjutan (*sustainability*). Ekstraktivisme merupakan pandangan dan sistem yang menjadikan sumber daya dan manusia hanya dikuras habis untuk keuntungan elit pemerintah. Sistem ini menempatkan pihak yang berkuasa dapat memaksakan kehendak kepada masyarakat yang lemah. Konsep ini terbagi menjadi tiga, yaitu *subjugation* (penundukan), *depletion* (pengurasan), dan *non-reciprocity* (tanpa timbal balik). Teknologi jika digunakan dengan sudut pandang tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, sedangkan masyarakat menjadi korban. Berbeda dengan ekstraktivisme, keberlanjutan memiliki dua aspek penting, yaitu timbal balik (*reciprocity*) dan penjagaan jangka panjang (*long-term stewardship*). Sudut pandang kedua ini memberikan kewajiban bagi pemerintah untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan menyiapkan negara untuk generasi yang akan datang (Cañavate, 2025).

Integrasi teknologi tingkat tinggi seperti nuklir dan kecerdasan buatan dalam narasi 200 hari menandai ambisi besar untuk mengatasi kegagalan sistemik masa lalu. Namun, tanpa konsensus yang inklusif dan komitmen terhadap prinsip timbal balik, pemerintah berisiko terjebak dalam pola ekstraktivisme baru yang hanya menguntungkan elit. Kehadiran negara yang sesungguhnya harus mampu memastikan bahwa modernisasi sistem tidak berujung pada eksploitasi yang tertutup, melainkan pada penjagaan jangka panjang atas hak-hak dasar dan gizi rakyat sebagai fondasi nasionalisme yang hakiki. Permasalahan lain yang dihadapi teknopolitik pemerintah adalah kesesuaian visi pemerintah terhadap situasi di masyarakat. Teknologi membutuhkan aspek sosiopolitik yang justru menjadi inti dari setiap kebijakan teknopolitik. Pemerintah perlu menyadari pentingnya media online, bukan hanya media sosial, untuk menjalankan fungsi penglibatan (*engagement*) publik, mendengarkan opini publik, sekaligus mengatasi potensi isu yang bisa meningkat menjadi krisis (Purworini & Chasana, 2024). Media menjadi kunci dalam setiap kebijakan pemerintahan.

IV. KESIMPULAN

Pemberitaan Presiden Prabowo Subianto dalam periode 100 hari dan 200 hari pemerintahan bergeser dari aspek emosional menuju aspek teknokratis. Narasi pemberitaan periode 100 hari pertama cenderung sangat emosional dan ideologis. Prabowo tampil dengan gaya tekno-populis, di mana teknologi media digunakan bukan sekadar untuk memperoleh eksposur, tapi untuk menjalin ikatan batin dengan rakyat. Fokus utama periode ini adalah kegagalan moral, yaitu sebuah kegelisahan bahwa negara dianggap berdosa jika membiarkan anak-anak Indonesia kekurangan gizi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai suatu kebijakan publik dan bukti kehadiran negara di masyarakat. Namun, memasuki periode 200 hari, narasi pemberitaan berubah menjadi lebih praktis dan teknokratis. Masalah yang diangkat tidak menysar moralitas, melainkan kegagalan sistemik. Pemerintah mulai membahas tentang sistem

yang usang, birokrasi yang lambat, dan lompatan teknologi. Narasi artefak teknologi tingkat tinggi dijalankan oleh pemerintahan Prabowo. Meskipun demikian, teknologi bukan merupakan solusi instan seluruh permasalahan. Ada beragam tantangan yang dapat menghambat gagasan teknokratis pemerintahan. Jika pemerintah hanya berfokus pada pendekatan atas ke bawah, maka teknologi dapat menjadi masalah tersendiri. Media online harus berperan netral dalam mengarahkan implementasi teknologi pemerintahan yang tepat dan berpihak kepada masyarakat. Penelitian lanjutan diperlukan untuk melengkapi khazanah pembeding berita untuk periode pasca 200 hari pemerintahan, mempertanyakan konsistensi pemerintah terhadap pandangan teknopolitik yang direncanakan sejak awal jabatan. Penelitian serupa juga perlu direplikasi untuk tingkatan pemerintah daerah. Saran praktis penelitian ini adalah pentingnya pengelola media pemerintahan untuk meningkatkan distribusi pesan kebijakan teknokratis dan melibatkan masyarakat bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., & Mona, N. (2024). Strategi Komunikasi Politik melalui Media Sosial oleh Calon Presiden Indonesia 2024. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 1-20.
- Alif, M. I. (2023). Komunikasi Politik: Penyampaian Pesan Dan Pemilihan Media Oleh Bakal Calon Presiden Dalam Pemilu Tahun 2024. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 8(3), 1-18.
- Arslan, A. C. (2025). Techno-Populist Leadership under Techno-Politics: The Case of Musk Effect. *International Journal of Public Leadership*, 1, 1-20.
- Azahra, F. F., Permadi, D., Edy, S. (2025). Analisis Framing Berita Putusan MK Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah di Media Online Tempo. co dan Kompas. com. *HULONDALO Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(2), 689-700.
- Cañavate, P. J. (2025). *Africa at the Nuclear Threshold: Atomic Ambitions, Energy Security, and the Strategic Crossroads of Proliferation, Terrorism, and Geopolitics* [Thesis]. University of Trento.
- Chung, H. F. (2026). Betting on (un) certain futures: Sociotechnical imaginaries of AI and varieties of techno-developmentalism in Asia. *Information, Communication & Society*, 29(3), 909-926.
- Dotson, T. (2015). Technological determinism and permissionless innovation as technocratic governing mentalities: psychocultural barriers to the democratization of technology. *Engaging Science, Technology, and Society*, 1, 98-120.
- Hafid, H., Jannah, S. R., & Jauhari, M. (2024). Strategi Komunikasi Politik “Nyantri” Prabowo Subianto dalam Memenangkan Pilpres 2024. *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*, 7(2), 262-277.
- Hausknot, D., Schrieffl, E., Lauk, C., & Kalt, G. (2017). A transition to which bioeconomy? An exploration of diverging techno-political choices. *Sustainability*, 9(4), 669.

- Hecht, G. (2009). *The radiance of France, new edition: Nuclear power and national identity after World War II*. MIT press.
- Husain, M. N. (2025). Analisis perubahan strategi komunikasi politik Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019 dan 2024. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 3(1), 20-28.
- Juditha, C. (2024). Komunikasi Politik Terkait Hoaks Pada Pemilu Presiden Indonesia 2024. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 28(2), 167-182.
- Karvonen, A. (2020). Urban techno-politics: knowing, governing, and imagining the city. *Science as Culture*, 29(3), 417-424.
- Mitha, A., & Sukmana, H. (2025). The Role of the Village Government in Agricultural Development in Wilayut Village. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(2), 619665.
- Mustainah, W., & Indrariyani, E. A. (2025). ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN 100 HARI GEBRAKAN PRABOWO-GIBRAN DI DUNIA PENDIDIKAN PADA MEDIA KOMPAS. COM. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03), 248-266.
- Noviafni, F. N., Sarmiati, S., & Asnawi, A. (2025). Persuasive Social MEDIA Communication Strategies in the 2024 West Sumatra Regional Elections. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(2), 619647.
- Pancani, P. C. T., & Ningsih, N. (2025). A Comprehensive Study on MBG (Makan Bergizi Gratis) in the Prabowo-Gibran Cabinet: Evaluating the Psychological and Health Impacts of the Policy on Underserved Communities. *Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan (SIKONTAN)*, 3(4), 77-186.
- Pora, S., Djen, R. A., & Muksin, D. Air Quality Recovery in Jakarta Province in the Era of Anies Baswedan: Solutions and Challenges. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(2), 619661.
- Purworini, D. (2014). Model informasi publik di era media sosial: Kajian grounded teori di pemda sukoharjo. *KomuniTi: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 6(1), 3-14.
- Purworini, D., & Chasana, R.R.B. (2024). The COVID-19 crisis response strategy and public opinion: The complexities involved in acquiring public support for the sticky crisis. *Journal of Contemporary Eastern Asia*, 23(2), 18-34.
- Putri, F. H., & Sanjaya, A. (2024). *Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Buzzer Era Kampanye Pemilu 2024 di Kompas.Com*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Rizky, A. T. J., Harris, E. A., & Soekarno, Z. P. (2023, November). Analisis komunikasi politik Prabowo Subianto di media sosial menjelang kontestasi Pemilihan Presiden 2024. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* (Vol. 2, pp. 673-680).
- Sanjaya, A., Fauzani, M. R., Riyadi, S., & Nugraha, A. L. (2024). Teknopolitik Pemimpin Federasi Sepakbola Indonesia Dalam Implementasi Teknologi Video Assistant Referee. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 8(2).

- Schaupp, S. (2021). Technopolitics from below: a framework for the analysis of digital politics of production. *NanoEthics*, 15(1), 71-86.
- Setyawan, S. (2017). Pola proses penyebaran dan penerimaan informasi teknologi kamera DSLR. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 9(2), 146-156.
- Strauss, P. L., & Metzger, G. E. (2021). *Power Transitions in a Troubled Democracy*. Liber Amicorum D'Alberti, Columbia Public Law Research Paper.
- Susetyawidianta, R. D., & Gerald, G. (2024). Political branding Prabowo-Gibran dalam pemilu presiden 2024: Analisa interaksionisme simbolik di media sosial Instagram dan Twitter. *Sintesa*, 3(01), 114-139.
- Syam, A., Zaeni, R., Arum, D. S., Kurnia, D., & Triwardhani, I. J. Communication Strategy in the Smart City Program Campaign Towards A Happy Digital Region Society. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(2), 619664.
- Zamzami, M., & Arviani, H. (2025). The diffusion of AI innovation by the UMKM Indonesia community (@ Umkmindonesiaofficial) in digital marketing communication. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 4(2), 619649.
- Zhang, J. (2022). Hardening national boundaries in a globally-connected world: Technology, development and nationalism in China. *Journal of Contemporary Asia*, 52(5), 783-804.
- Zulfikar, I. G., Wibisono, Y., & Wahyudin, A. (2025). Intelligent News Aggregation System with Automatic Classification, Clustering, and Summarization. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 5(2), 689-696.